



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Raih WTP Dua Tahun Berturut-turut**



**PRESTASI:** Bupati Mian menerima LHP LKPD dengan predikat WTP dari BPK Perwakilan Bengkulu, belum lama ini.

**ARGA MAKMUR** - Pengelolaan belanja daerah setiap tahunnya bukan tak tanpa pengawasan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi institusi yang setiap tahun memeriksa kepatuhan pemerintah atas pelaksanaan belanja daerah secara mendetail.

Dari audit tersebut kerap ditemukan belanja-belanja daerah yang tidak wajar dan bertentangan dengan aturan yang akan digambarkan dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK.

► Baca **RAIH...Hal 7**

Terkait hal itu, BU sudah dua tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini menunjukkan kepatuhan Pemkab BU dalam belanja APBD. Kerap berubahnya aturan belanja APBD membuat BU harus jeli melihat aturan sehingga tetap berada di garis aturan.

Bupati Mian menuturkan, jika besarnya anggaran dan banyaknya kewajiban belanja tak berarti membuat OPD justru mengenyampingkan aturan yang ada. Justru dengan patuh pada aturan membuat pekerjaan lebih terarah. "Saya tegaskan sejak awal kepemimpinan, cari aturan terbaru dan patuh pada aturan," katanya.

WTP yang diraih Pemkab BU dua tahun berturut-turut banyak menuai pujian dari berbagai pihak. Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk tetap patuh dan mempertahankan predikat opini yang diraih dari BPK tersebut untuk tahun-tahun berikutnya. "BPK adalah lembaga negara yang diberikan fungsi untuk audit dan memeriksa kepatuhan pemerintah. Opini WTP tersebut

harus kita pertahankan yang berarti kita harus patuh pada aturan pengelolaan keuangan," katanya.

Raihan WTP tersebut juga menghasilkan kebaikan baik Pemkab BU. Dengan kepatuhan terhadap pengelolaan anggaran tersebut, Pemkab BU berhak mengajukan Dana Insentif Daerah (DID) yang salah satu syaratnya adalah WTP.

"Kita juga sudah memenuhi syarat menujunya angka kemiskinan, pengesahan APBD sebelum tahun anggaran dan beberapa syarat lainnya. Ini semua untuk pembangunan BU," pungkas Mian.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKAD) Dr. Agus Haryanto, SE, MM juga tak bisa duduk santai untuk meraih opini WTP dan berbagai penghargaan tersebut. Ia terus berkoordinasi dengan OPD terkait aturan-aturan terbaru yang harus menjadi dasar pelaksanaan sehingga terus mempertahankan opini tersebut.

"Aturan harus terus menjadi dasar. Sehingga kita jugaterus harus mengawasi proses penyerapan dan pengajuan anggaran," pungkas Agus. (qia)